



**PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2020
(AUDITED)**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2020**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami atas nama Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta, menyajikan Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020.

Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 disusun sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tercantum pada Pasal 99 (1) bahwa : Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana, yang berada dalam tanggung jawabnya.

Secara ringkas Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. LAPORAN REALISASI APBD

Laporan Realisasi APBD menggambarkan perbandingan antara APBD Tahun Anggaran 2020 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- A. Pendapatan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp. 16.733.114.125,00
realisasinya mencapai sebesar Rp. 16.617.768.388,71
sehingga kurang dari target sebesar Rp. 115.345.736,29
atau sebesar **99,31 %**.
- B. Belanja Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup DIY pada Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp. 48.030.733.178,00
realisasinya mencapai sebesar Rp. 44.389.681.878,00
sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 3.641.051.300,00
atau sebesar **92,42 %**.
- C. Anggaran Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup DIY pada Tahun Anggaran 2020 ditetapkan defisit sebesar Rp. 31.297.619.053,00 dengan realisasi defisit sebesar Rp. 27.771.913.489,29 atau sebesar 88,73 %.

2. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup DIY untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan terdiri dari Pendapatan-LO, Beban, Transfer dan Pos-pos Luar Biasa, dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan-LO sebesar :	Rp.	16.247.577.477,05
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	Rp.	15.837.816.352,05
Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LO	Rp.	409.761.125,00
Surplus Non Operasional – LO	Rp.	0,00
Surplus dari kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	Rp.	0,00
Beban Operasi sebesar	Rp.	46.490.332.557,38
Terdiri dari Beban Pegawai - LO	Rp.	26.331.842.909,00
Beban Barang dan Jasa	Rp.	15.036.462.641,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp.	5.122.027.007,38
Beban Penyisihan Piutang	Rp.	0,00
Surplus/Defisit dari Operasi	Rp.	-30.242.755.080,33

3. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup DIY mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana pada 31 Desember 2020.

Jumlah Aset per 31 Desember 2020 sebesar	Rp.	112.819.832.571,24
yang terdiri dari Aset Lancar sebesar	Rp.	1.716.824.470,63
Aset Tetap sebesar	Rp.	106.493.214.203,61
dan Aset Lainnya sebesar	Rp.	4.609.793.897,00
Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2020 sebesar	Rp.	29.706.538,00
yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar	Rp.	29.706.538,00
Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar	Rp.	112.790.126.033,24

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut :

Ekuitas Awal	Rp.	116.853.960.307,36
RK PPKD	Rp.	27.775.596.408,29
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp.	2.060.299.429,26
Ekuitas Akhir	Rp.	146.689.856.144,91

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, kondisi ekonomi makro, kebijakan keuangan, kebijakan akuntansi dan penjelasan atas pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai serta peristiwa penting setelah tanggal pelaporan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran pengakuan Pendapatan-LRA, Belanja dan Pembiayaan menggunakan basis kas yaitu pada saat diterima dan dikeluarkan oleh dan dari kas daerah. Sementara dalam penyajian Neraca dan Laporan Operasional pengakuan Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan-LO, Beban dan Transfer menggunakan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima dan dikeluarkan oleh dan dari kas daerah.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup DIY Tahun Anggaran 2020 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna (*stakeholders*).

Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan yang transparan, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel), serta tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Desember 2020

PLT. Kepala SKPD

IR.HANANTO HADI PURNOMO, M.SC.

NIP. 19610223 198902 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

LAPORAN REALISASI APBD (LRA)

- LRA STRUKTUR SAP (LRA 64) , dicetak level jenis
- LRA STRUKTUR APBD (LRA 13) , dicetak level jenis

LAPORAN OPERASIONAL (LO), dicetak level jenis

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE) , dicetak level jenis

NERACA, dicetak level jenis

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

BAB III. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

BAB IV. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN

1. Rincian LRA menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
2. Rekapitulasi LRA menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan
3. Penjabaran LRA
4. Kertas Kerja Penyusunan Laporan Keuangan SKPD (Kertas Kerja SIPKD)
5. Berita Acara Penutupan Kas
6. Register Penutupan Kas
7. Berita Acara Pemeriksaan Kas
8. Register Pemeriksaan Kas
9. Rekapitulasi Belanja Barang Jasa (Pakai Habis)
10. Berita Acara Stock Opname Persediaan
11. Rekapitulasi Belanja Modal (Aset Tetap)
12. Kertas Kerja Mutasi Persediaan sesuai hasil rekon antara Petugas Akuntansi dan Penyimpan Barang
13. Kertas Kerja Aset Tetap dan Aset Lainnya
14. Rekap Penyusutan Aset Tetap dan Rekap Penyusutan Aset Lain-lain
15. Rincian per jenis Aset Tetap (Print out dari SIPKD Modul Aset)

PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN

Laporan Keuangan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup D.I. Yogyakarta yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), (b) Laporan Operasional (LO), (c) Neraca, (d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan secara layak, sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

PLT. Kepala SKPD

IR.HANANTO HADI PURNOMO, M.SC.

NIP. 19610223 198902 1 001

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. menyajikan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan masyarakat;
- e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, mengenai kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas pemerintah daerah.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keuangan Pemerintah Daerah. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 249);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan

Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 581);

15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 9);
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2011 tentang Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 53);
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 121);
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 123);
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 114);
23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 128 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 130);
24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Persediaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 100);
25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah;
26. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 88);
27. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 130 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 130);

28. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 140 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 141);
29. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri Dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 75);
30. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 90) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 91).

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Judul

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Versi SAP (LRA 64), Level Jenis

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Versi APBD (LRA 13), Level Jenis

Laporan Operasional (LO), Level Jenis

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Level Jenis

Neraca, Level Jenis

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Bab I Pendahuluan

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab III Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD

3.1. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1. Pendapatan-LRA

3.1.2. Belanja

3.1.3. Pendapatan-LO

3.1.4. Beban

3.1.5. Aset

3.1.6. Kewajiban

3.1.7. Ekuitas

Bab IV Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

Bab V Penutup

Lampiran Laporan Keuangan

- a. Lampiran LRA
 - 1) Rincian LRA menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
 - 2) Rekapitulasi LRA menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan
 - 3) Penjabaran LRA dicetak dari aplikasi SIPKD
- b. Lampiran Neraca
 - 1) Kertas Kerja Penyusutan Laporan Keuangan SKPD
 - 2) Berita Acara Penutupan Kas
 - 3) Register Penutupan Kas
 - 4) Berita Acara Pemeriksaan Kas
 - 5) Register Pemeriksaan Kas
 - 6) Rekapitulasi Belanja Barang Jasa (Pakai Habis)
 - 7) Berita Acara Stock Opname Persediaan
 - 8) Rekapitulasi Belanja Modal (Aset Tetap)
 - 9) Kertas Kerja Mutasi Persediaan Sesuai Hasil Rekon antara Petugas Akuntansi dan Penyimpan Barang
 - 10) Kertas Kerja Aset Tetap dan Aset Lainnya
 - 11) Rekap Penyusutan Aset Tetap dan Rekap Penyusutan Aset Lain-lain
 - 12) Rincian per Jenis Aset Tetap

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	BERLEBIH/ (BERKURANG)	PRESENTASE
	PERUBAHAN (Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
DLHK DIY				
Pendapatan	16.733.114.125,00	16.617.768.388,71	(115.345.736,29)	99,31
Pendapatan Asli Daerah	16.733.114.125,00	16.617.768.388,71	115.345.736,29	99,31
Hasil Retribusi Daerah	16.323.353.000,00	16.208.007.263,71	115.345.736,29	99,29
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	409.761.125,00	409.761.125,00	0,00	100,00
BELANJA	48.030.733.178,00	44.389.681.878,00	(3.641.051.300,00)	92,42
Belanja Tidak Langsung	23.261.645.769,00	21.962.3577.363,00	(1.299.068.406,00)	94,42
Belanja Pegawai	23.261.645.769,00	21.962.577.363,00	(1.299.068.406,00)	94,42
Belanja Langsung	24.769.087.409,00	22.427.104.515,00	(2.341.982.894,00)	90,54
Belanja Pegawai	4.517.546.700,00	4.369.265.546,00	(148.281.154,00)	96,72
Belanja Barang dan Jasa	19.455.633.217,00	17.303.537.869,00	(2.152.095.348,00)	88,94
Belanja Modal	795.907.492,00	754.301.100,00	(.41.606.392,00)	94,77
SURPLUS/(DEFISIT)	(31.297.619.053,00)	(27.771.913.489,29)	3.525.705.563,71	88,73

2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Belanja dianggarkan sebesar Rp 48.030.733.178,00 dan realisasi sebesar Rp 44.389.681.878,00 atau 92,42 %.

Secara umum pelaksanaan belanja daerah dan kinerja dapat di capai dengan baik, tetapi masih terdapat kendala yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup D.I. Yogyakarta.

Kendala yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup DIY meliputi :

Kendala yang dihadapi oleh Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta meliputi :

1. Belanja Pendapatan
2. Belanja Tidak Langsung
3. Belanja Langsung
 - a. Pada belanja jasa kantor Balai KPH Yogyakarta realisasi didasarkan atas pembayaran sesuai dengan realisasi tagihan serta ada tambahan anggaran pada perubahan DPA, contohnya pada belanja Listrik, Air, Telepon, paket pengiriman, surat kabar dan STNK. maka realisasi penggunaan belanja lebih kecil dari anggaran Balai KPH Yogyakarta.
 - b. Pada kegiatan pengelolaan Minyak Kayu Putih untuk Uang lembur PNS, BBM, Penggandaan, sarana mobilitas darat, makan minum harian pegawai. Pencapaian target pengolahan minyak kayu putih menggunakan indikator yaitu pemenuhan target volume liter minyak kayu putih.

Sedangkan bahan baku penentuan rencana kebutuhannya bersifat prediktif. Target bahan baku (Daun) di lapangan dengan target 4.543 Ton, proses penyulingan di pabrik dengan target 41.610 Liter. Pada tahun 2020 realisasi volume liter minyak kayu putih sebesar 40.353 liter (Defisit1.257 liter dari target yang telah ditetapkan) dan bahan baku daun 4.384,75 ton (defisit158,25 ton dari target yang telah ditetapkan). Artinya biaya terkait pengolahan MKP di lapangan tidak terserap 100%. Hal utama dari target volume liter MKP dan prediksi bahan baku daun kayu putih adalah iklim dan cuaca Serta penundaan pengadaan barang dan jasa, arahan untuk tidak mengumpulkan orang sebagai pencegahan dan penanganan covid 19.

- c. Pemeliharaan kendaraan Dinas/operasional terhambat dikarenakan volume operasional kendaraan secara umum berkurang, sebagai tindak lanjut kebijakan tanggap darurat Covid 19 dengan sisa Service Rp. 1000.000,00, sisa suku cadang Rp. 27.667.000,00, dan sisa bahan bakar minyak/gas dan pelumas Rp. 17.577.686,00.
- d. Pada perencanaan dan reboisasi sumberdaya hutan terdapat sisa tender/lelang pengadaan ajir sebesar Rp. 209.094.200,00; sisa pupuk kandang Rp. 253.957.200,00; sisa tinta plotter Rp. 795.000,00; sisa cetak Rp. 652.000,00; sisa angkutan barang bukti dan bibit Rp. 7.600.000,00; sisa mamin perjalanan tetap (pensiun) Rp. 2.400.000,00; sisa perjalanan tetap (pensiun) Rp. 5.970.000,00; saving Rp. 4.875.000,00

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD

3.1. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

	2020	2019 (Audited)
3.1.1. <u>Pendapatan-LRA</u>	<u>Rp. 16.617.768.388,71</u>	<u>Rp. 18.536.311.883,08</u>

Pendapatan-LRA Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup DIY Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp. 16.733.114.125,00 dan realisasi sebesar Rp. 16.617.768.388,71 atau 99,31 % dengan rincian sebagai berikut:

3.1.1.1 Pendapatan Retribusi -LRA Rp 16.208.007.263,71 Rp 16.008.978.633,08

Pendapatan Retribusi-LRA Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup DIY Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp 16.323.353.000,00 dan realisasi sebesar Rp 16.208.007.263,71 atau 99,29 % dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	122.591.000,00	118.748.500,00	96,87	386.757.500,00
2	Retribusi Tempat - Penginapan/ Pesanggarahan/Villa	6.000.000,00	4.200.000,00	70,00	8.700.000,00
3	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	15.107.000,00	13.541.000,00	89,63	0,00
3	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	11.790.715.000,00	11.074.236.879,00	93,92	10.887.330.388,00
4	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	4.388.940.000,00	4.997.280.884,71	113,86	4.726.190.745,08
	Jumlah	16.733.114.125,00	16.617.768.388,71	99,31	16.008.978.633,08

3.1.1.2 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah -LRA Rp 409.761.125,00 Rp 2.527.333.250,00

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LRA Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup DIY Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp **409.761.125,00** dan realisasi sebesar Rp **409.761.125,00** atau 100,00 % dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Penjualan Hasil Kehutanan	0,00	0,00	0,00	47.000.000,00
2	Sewa Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	20.131.375,00
3	Pengelolaan Hutan Lindung	403.917.625,00	403.917.625,00	100,00	2.411.134.750,00
3	Pengelolaan hutan produksi klayar kenet	1.580.750,00	1.580.750,00	100,00	868.000,00
4	Pengelolaan hutan produksi ngingrong mulo	4.262.750,00	4.262.750,00	100,00	21.365.750,00
	Jumlah	409.761.125,00	409.761.125,00	100,00	2.527.333.250,00

3.1.2. Belanja

2020

2019 (Audited)

3.1.2 Belanja-LRA

Rp 44.389.681.878,00

Rp 57.042.253.228,00

Belanja Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup DIY Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp 48.030.733.178,00 dengan realisasi sebesar Rp 44.389.681.878,00 atau 92,41 %. Rincian realisasi belanja terdiri dari :

3.1.2.1 Belanja Tidak Langsung

Rp 21.962.577.363,00

Rp 52.077.559.250,00

Belanja Tidak Langsung Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup DIY Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp 23.261.645.769,00 dan realisasi sebesar Rp 21.962.577.363,00 atau 94,42 %, dengan rincian sebagai berikut:

3.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Rp 21.962.577.363,00

Rp 28.806.165.751,00

Belanja Pegawai Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup DIY Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp. 23.261.645.769,00 dan realisasi sebesar Rp. 21.962.577.363,00 atau 94,42 %, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Gaji Dan Tunjangan LRA			
a.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi-LRA	18.963.176.740,00	18.017.357.308,00	95,01
b.	Tunjangan Keluarga-LRA	1.514.592.168,00	1.448.549.486,00	95,64
c.	Tunjangan Jabatan-LRA	405.690.000,00	394.810.000,00	97,32
d.	Tunjangan Fungsional	546.780.000,00	536.635.000,00	98,14
e.	Tunjangan Fungsional Umum-LRA	557.510.000,00	550.855.000,00	98,81
f.	Tunjangan Beras-LRA	720.477.612,00	709.209.060,00	98,44
g.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus-LRA	63.248.795,00	36.929.931,00	58,39
h.	Pembulatan Gaji-LRA	469.864,00	198.974,00	42,35
	Jumlah	22.771.945.179,00	21.694.544.759,00	95,27
2.	Biaya Insentif Retribusi Daerah – LRA			
a.	Biaya Insentif Retribusi Jasa Umum	131.668.200,00	131.497.604,00	99,87
b.	Biaya Insentif Retribusi Jasa Usaha	358.032.390,00	136.535.000,00	38,13
	Jumlah	489.700.590,00	268.032.604,00	54,73

3.1.2.2 Belanja Langsung

Rp 22.427.104.515,00

Rp 52.077.559.250,00

Belanja Tidak Langsung Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup DIY Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp 24.769.087.409,00 dan realisasi sebesar Rp 22.427.104.515,00 atau 90,54 %, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
3.	Honorarium PNS	262.220.000,00	250.153.750,00	95,40
a.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	84.500.000,00	84.500.000,00	100,00
b.	Honorarium Pengelola Keuangan	113.160.000,00	105.413.750,00	93,15
c.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	13.680.000,00	12.240.000,00	89,47
d.	Honorarium Perencana Program	2.880.000,00	0,00	0,00
e.	Honorarium Pengelola Barang	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00
5.	Honorarium Non PNS	4.255.326.700,00	4.119.111.796,00	96,80
a.	Honorarium Harian Non PNS	4.242.126.700,00	4.105.911.796,00	96,79
b.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	13.200.000,00	13.200.000,00	100,00

3.1.2.2.1 Belanja Barang dan Jasa Rp 17.303.537.869,00 Rp 23.271.393.499,00

Belanja Barang dan Jasa Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup DIY Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp 19.455.633.217,00 dan realisasi sebesar Rp 17.303.537.869,00 atau 88,94 %, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1.	Belanja Bahan Pakai Habis	539.315.100,00	455.854.400,00	84,52	358.632.114,00
2.	Belanja Bahan/ Material	3.019.526.950,00	2.367.270.800,00	78,40	2.796.300.821,00
3.	Belanja Jasa Kantor	4.031.843.967,00	3.602.800.493,00	89,36	3.329.174.899,00
4.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.670.975.500,00	3.519.271.644,00	95,87	4.817.457.391,00
5.	Belanja Cetak Dan Penggandaan	238.842.200,00	227.558.900,00	95,28	398.531.100,00
6.	Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir	3.000.000,00	2.900.000,00	96,67	36.800.000,00
7.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	708.903.500,00	608.297.250,00	85,81	626.421.375,00
8.	Belanja Sewa Alat Berat	444.420.000,00	420.420.000,00	94,60	49.700.000,00
9.	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	800.000,00	800.000,00	100,00	38.815.000,00
10.	Belanja Makanan Dan Minuman	639.184.000,00	598.656.000,00	93,66	1.268.399.000,00
11.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	56.105.000,00	54.561.500,00	97,25	
12.	Belanja Pakaian Kerja	129.850.000,00	121.530.000,00	93,59	44.936.000,00
13.	Belanja Perjalanan Dinas	847.960.000,00	759.774.573,00	89,60	1.899.964.379,00
14.	Belanja Pemeliharaan	4.498.515.000,00	3.986.862.309,00	88,63	4.555.310.920,00
15.	Belanja Jasa Konsultansi	190.289.000,00	160.380.000,00	84,28	1.104.512.000,00
16.	Belanja Perawatan dan Pengobatan	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	-
17.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	106.603.000,00	87.100.000,00	81,71	522.135.000,00
18.	Belanja Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	304.500.000,00	304.500.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	19.455.633.217,00	17.303.537.869,00	88,94	23.271.393.499,00

3.1.2.2 Belanja Modal Rp 754.301.100,00 Rp 4.964.693.978,00

Belanja Modal Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup D.I Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp 795.907.492,00 dan realisasi sebesar Rp 754.301.100,00 atau 94,77 %, dengan rincian sebagai berikut:

3.1.2.2.1 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Rp 238.340.000,00 Rp. 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp 253.316.500,00 dan realisasi sebesar Rp 238.340.000,00 atau 94,09 %, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
7.	Belanja Modal Pengadaan Alat Produksi Kehutanan dan Perkebunan	253.316.500,00	238.340.000,00	94,09	0,00
	Jumlah	253.316.500,00	238.340.000,00	94,09	0,00

Belanja Modal Pengadaan Alat Produksi Kehutanan dan Perkebunan tersebut telah dicatat menambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 238.340.000,00

3.1.2.3.2 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Rp 201.913.000,00 Rp. 1.537.868.653,00

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp 216.873.517,00 dan realisasi sebesar Rp .201.913.000,00 atau 93,10 %, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1.	Belanja Modal Pengadaan Almari	5.000.000,00	4.900.000,00	98,00	669.452.100,00
2.	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner	77.400.000,00	71.285.500,00	92,10	76.488.000,00
3	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Instansi	89.473.517,00	85.749.000,00	95,84	0,00
4	Belanja Modal Pengadaan Wastafel	45.000.000,00	39.978.5000,00	88,84	0,00
	Jumlah	216.873.517,00	201.913.000,00	93,10	746.040.100,00

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor tersebut telah dicatat menambah Aset Tetap sebesar Rp. 201.913.000,00.

3.1.2.3.3 Belanja Modal Pengadaan Komputer Rp 116.112.000,00 Rp. 0,00

Belanja Modal Pengadaan Komputer Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp 125.483.000,00 dan realisasi sebesar Rp 116.112.000,00 atau 92,53 %, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1.	Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	66.380.000,00	64.760.000,00	97,56	730.298.500,00
2.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	.9.418.000,00	9.418.000,00	100,00	889.989.600,00
3	Belanja Modal Pengadaan Printer	49.685.000,00	41.934.000,00	84,40	
	Jumlah	125.483.000,00	116.112.000,00	92,53	1.620.288.100,00

Belanja Modal Pengadaan Komputer tersebut telah dicatat menambah Aset Tetap sebesar Rp. 116.112.000,00.

3.1.2.3.4 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair Rp 13.120.000,00 Rp. 0,00

Belanja Modal Pengadaan Komputer Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp 13.396.000,00 dan realisasi sebesar Rp 13.120.000,00 atau 97,94 %, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	10.824.000,00	10.600.000,00	97,93	0,00
2.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	.2.572.000,00	2.520.000,00	97,98	0,00
	Jumlah	13.120.000,00	13.120.000,00	97,94	0,00

Belanja Modal Pengadaan Komputer tersebut telah dicatat menambah Aset Tetap sebesar Rp. 13.120.000,00.

3.1.2.3.5 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio Rp 34.073.000,00 Rp. 0,00

Belanja Modal Pengadaan Alat Studio Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp 34.512.000,00 dan realisasi sebesar Rp 34.073.000,00 atau 98,73 %, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	20.592.000,00	20.169.000,00	97,95	0,00
2.	Belanja Modal Pengadaan LCD	.13.920.000,00	13.904.000,00	99,89	0,00
	Jumlah	34.512.000,00	34.073.000,00	98,73	0,00

Belanja Modal Pengadaan Alat Studio tersebut telah dicatat menambah Aset Tetap sebesar Rp. 34.073.000,00.

3.1.2.3.6 Belanja Modal Pengadaan Alat Lab Rp 49.503.000,00 Rp 0,00

Belanja Modal Pengadaan Alat Lab Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp 49.640.000,00 dan realisasi sebesar Rp 49.503.000,00 atau 99,72 %, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1.	Belanja Modal Pengadaan Alat Lab	49.640.000,00	49.503.000,00	97,72	0,00
	Jumlah	49.640.000,00	49.503.000,00	97,72	0,00

Belanja Modal Pengadaan Alat Lab tersebut telah dicatat menambah Aset Tetap sebesar Rp. 49.503.000,00.

3.1.2.3.6 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Rp 101.240.100,00 Rp 0,00

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp 102.686.475,00 dan realisasi sebesar Rp 101.240.100,00 atau 98,59 %, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2019
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1.	Belanja Modal Pengadaan Pembelian Gedung Kantor	86.321.475,00	85.042.600,00	98,52	0,00
2.	Belanja Modal Pembangunan Prasarana Kawasan Perkantoran	16.365.000,00	16.197.500,00	98,98	
	Jumlah	102.686.475,00	101.240.100,00	98,59	0,00

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan tersebut telah dicatat menambah Aset Tetap sebesar Rp. 101.240.100,00.

3.2. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

	2020	2019
3.2.1 <u>Pendapatan-LO</u>	<u>Rp 16.247.577.477,05</u>	<u>Rp 9.084.321.285,74</u>

Pendapatan LO Tahun 2020 sebesar Rp 16.247.577.477,05 meliputi Pendapatan Retribusi-LO sebesar Rp 15.837.816.352,05 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah-LO sebesar Rp 409.761.125,00 dengan rincian sebagai berikut:

3.2.1.1 <u>Pendapatan Retribusi Daerah-LO</u>	<u>Rp 15.837.816.352,05</u>	<u>Rp 6.556.988.035,74</u>
--	------------------------------------	-----------------------------------

Realisasi Pendapatan Retribusi-LO pada Tahun 2020 sebesar Rp 15.837.816.352,05 terdiri dari Pendapatan Retribusi Daerah LO yang telah diterima secara kas dan telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp. 15.837.816.352,05

3.2.1.2 <u>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah -LO</u>	<u>Rp 409.761.125,00</u>	<u>Rp 2.527.333.250,00</u>
---	---------------------------------	-----------------------------------

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO pada Tahun 2020 sebesar Rp 409.761.125,00 terdiri dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO yang telah diterima secara kas dan telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp. 409.761.125,00 dan diterima oleh Bendahara Penerimaan pada akhir Tahun 2020 namun belum disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp. 0,00 dan Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang telah ditetapkan dengan Surat Ketetapan tetapi belum dibayar oleh wajib pajak sebesar Rp. 0,00.

3.2.1.3 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya -LO **Rp 0,00** **Rp 6.992.284.172,00**

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya -LO pada Tahun 2020 sebesar Rp. 0,00.

2020 **2019**

3.2.2 Beban Operasi - LO **Rp 46.490.332.557,38** **Rp 55.069.296.154,07**

Realisasi Beban Operasi Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup DIY Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 46.490.332.557,38 adalah penurunan manfaat ekonomi, jasa, pengeluaran dan konsumsi aset selama periode Tahun Anggaran 2020, dengan rincian sebagai berikut:

3.2.2.1. Beban Pegawai **Rp 26.331.842.909,00** **Rp 26.830.029.717,00**

Realisasi Beban Pegawai Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup DIY Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 26.331.842.909,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019
1.	Beban Gaji dan Tunjangan	21.694.544.759,00	20.162.874.215,00
a.	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	18.017.375.308,00	16.176.194.600,00
b.	Tunjangan Keluarga – LO	1.448.549.486,00	1.570.967.350,00
c.	Tunjangan Jabatan – LO	394.810.000,00	437.020.000,00
d.	Tunjangan Fungsional – LO	536.635.000,00	594.900.000,00
e.	Tunjangan Fungsional Umum – LO	550.855.000,00	574.415.000,00
f.	Tunjangan Beras - LO	709.209.060,00	766.131.180,00
g.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus – LO	36.929.931,00	43.019.973,00
h.	Pembulatan Gaji - LO	198.974,00	226.112,00
	Jumlah	21.694.544.759,00	20.162.874.215,00
2.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah		
a.	Insentif Retribusi Jasa Usaha - LRA	268.032.604,00	464.446.986,00
	Jumlah	268.032.604,00	464.446.986,00
3.	Honorarium PNS	250.153.750,00	875.387.000,00
a.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	84.500.000,00	592.612.000,00
b.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	49.525.000,00
c.	Honorarium Pengelola Keuangan	105.413.750,00	174.400.000,00
d.	Honorarium Pengelola Kepegawaian	12.240.000,00	10.800.000,00
e.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	0,00	44.450.000,00
f.	Honorarium Perencanaan Program	0,00	3.600.000,00
	Jumlah	250.153.750,00	875.387.000,00
5.	Honorarium Non PNS	4.119.111.796,00	5.327.321.516,00
a.	Honorarium Pegawai Honorar / Tidak Tetap	0,00	2.698.616.316,00
b.	Honorarium Harian Non PNS	4.105.911.796,00	2.628.705.200,00
c.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	13.200.000,00	0,00
	Jumlah	4.119.111.796,00	5.327.321.516,00
	Jumlah Beban Pegawai	26.331.842.909,00	26.830.029.717,00

3.2.2.2 Beban Barang dan Jasa **Rp 15.036.462.641,00** **Rp 21.324.356.737,00**

Realisasi Beban Barang dan Jasa Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup DIY Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 15.036.462.641,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2019
1.	Beban Persediaan Bahan Pakai Habis	0,00	4.139.743.163,00
2.	Beban Persediaan Bahan/ Material	0,00	3.286.674.401,00

3.	Beban Jasa Kantor	3.592.186.248,00	3.246.142.696,00
4.	Beban Premi Asuransi	0,00	51.976.500,00
5.	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	218.256.600,00	1.165.525.798,00
6.	Beban Persediaan Cetak	0,00	345.956.650,00
7.	Beban Persediaan Penggandaan	0,00	45.064.250,00
8.	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.900.000,00	36.800.000,00
9.	Beban Sewa Sarana Mobilitas	608.297.250,00	99.204.400,00
10.	Beban Sewa Alat Berat	420.420.000,00	49.700.000,00
11.	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	800.000,00	38.815.000,00
12.	Beban Makanan dan Minuman	598.656.000,00	1.249.614.000,00
13.	Beban Persediaan Pakaian Kerja	0,00	86.580.000,00
14.	Beban Perjalanan Dinas	759.774.573,00	1.870.814.379,00
15.	Beban Pemeliharaan	3.696.850.825,00	3.748.221.000,00
16.	Beban Jasa Konsultasi	160.380.000,00	855.389.500,00
17.	Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	87.100.000,00	522.135.000,00
18.	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	304.500.000,00	486.000.000,00
	Jumlah	15.036.462.641,00	21.324.356.737,00

3.2.2.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp 5.122.027.007,38 Rp 6.912.720.980,56

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup DIY Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 5.122.027.007,38 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	3.581.017.037,36	4.822.597.689,29
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	640.625.422,25	868.414.858,42
3.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	900.384.547,77	1.221.708.432,85
	Jumlah	5.122.027.007,38	6.912.720.980,40

3.2.2.4 Beban Penyisihan Piutang Rp 0,00 Rp 2.188.719,51

Realisasi Beban Penyisihan Piutang Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup DIY Tahun Anggaran 2020 adalah NIHIL :

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019
1.	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Retribusi	0,00	2.188.719,51
	Jumlah	0,00	2.188.719,51

3.3. N E R A C A

3.3.1 Aset

Aset Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup DIY per 31 Desember 2020 sebesar Rp 112.819.832.571,24 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 1.716.824.470,63 Aset Tetap sebesar Rp 106.493.214.203,61 dan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 4.609.793.897,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2020	2019 (Audited)
3.3.1.1 <u>Aset Lancar</u>	<u>Rp 1.716.824.470,63</u>	<u>Rp 2.110.099.871,15</u>

Aset Lancar per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 1.716.824.470,63 dengan rincian sebagai berikut:

3.3.1.1.1 <u>Kas dan Setara Kas</u>	<u>Rp 3.682.919,00</u>	<u>Rp 509.388,00</u>
--	-------------------------------	-----------------------------

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 3.682.919,00 terdiri dari Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp. 3.682.919,00 dan Kas di Bendahara Penerimaan tersebut telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 1 Januari 2020.

3.3.1.1.2 Piutang Pendapatan Rp 489.293.338,00 Rp 437.743.902,66

Saldo Piutang Pendapatan adalah piutang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 489.293.338,00

3.3.1.1.3 Piutang Lainnya Rp 0,00 Rp 0,00

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,00

3.3.1.1.4 Penyisihan Piutang Rp -2.446.466,69 Rp -2.188.719,51

Saldo Penyisihan Piutang adalah Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2020 sebesar Rp. -2.446.466,69

3.3.1.1.5 Persediaan Rp 1.226.294.680,32 Rp 1.674.035.300,00

Saldo Persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.226.294.680,32 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2020	2019
1.	Barang Pakai Habis	1.226.294.680,32	1.674.035.300,00
	a. Bahan	791.015.000,00	1.605.210.000,00
	b. Alat /Bahan Untuk Kegiatan Kantor	194.178.250,00	50.886.100,00
	c. Persediaan untuk dijual/diserahkan	241.101.430,32	17.939.200,00
	Jumlah	1.226.294.680,32	1.674.035.300,00

Adapun rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2020 di masing-masing KPA adalah sebagai berikut :

No	K P A	Jumlah 2020	Jumlah 2019
1.	Induk	933.456.799,68	1.662.908.500,00
2.	Balai KPH	292.837.880,32	11.126.800,00
	Jumlah	1.226.294.680,32	1.674.035.300,00

3.3.1.2 Aset Tetap Rp 106.493.214.203,61 Rp 109.744.215.295,21

Aset Tetap per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 106.493.214.203,61 dan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan saldo yang disebabkan penambahan yang berasal dari mutasi, reklas dan lain-lain, dengan rincian sebagai berikut:

3.3.1.2.1 Tanah Rp 38.501.670.972,00 Rp 38.501.670.972,00

Saldo Tanah per 31 Desember 2020 sebesar Rp 38.501.670.972,00 dan tidak ada mutasi tambah maupun mutasi kurang dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2020	2019
1.	Tanah Perkampungan	8.583.317.892,00	8.583.317.892,00

	a. Tanah Kampung	8.583.317.892,00	8.583.317.892,00
2.	Tanah Untuk Bangunan Gedung	26.743.743.080,00	26.743.743.080,00
	a. Bangunan Perumahan/Gedung tempat tinggal	2.633.200.000,00	2.633.200.000,00
	b. Bangunan Tempat Kerja	24.110.543.080,00	22.579.230.000,00
	c. Tanah Kosong	0,00	1.531.313.080,00
3.	Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	3.174.610.000,00	3.174.610.000,00
	Jumlah	38.501.670.972,00	38.501.670.972,00

Adapun rincian saldo tanah per 31 Desember 2020 di masing-masing KPA adalah sebagai berikut :

No	K P A	Jumlah 2020	Jumlah 2020
1.	Induk	29.080.727.892,00	29.080.727.892,00
2.	Balai KPH	9.420.943.080,00	9.420.943.080,00
	Jumlah	38.501.670.972,00	38.501.670.972,00

3.3.1.2.2 Peralatan dan Mesin Rp 52.901.527.431,98 Rp 49.180.637.087,98

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp 52.901.527.431,98,- dengan penjelasan perubahan mutasi sebagai berikut:

a. Mutasi Tambah

Mutasi tambah Peralatan dan Mesin dari Dinas Induk terdiri dari :

- Mutasi Aset Tetap Alat Besar Darat Rp. 3.178.855.500,-
Limpahan Buldozer ke Balai Sampah DLHK DIY dari Dinas PU DIY
- Alat Bantu Rp. 13.890.000,- Belanja modal water filter lab ling
- Alat Ukur Rp. 7.490.000,- Belanja modal botol sampel Lab Ling
- Alat Kantor Rp. 82.427.500,-
Belanja modal Papan Nama Instansi Rp. 82.427.500,-
- Alat Rumah Tangga Rp. 111.264.000,-
Belanja Modal Pengadaan Washtafel Rp. 39.978.500,-
Belanja modal AC dinas induk Rp. 71.285.500,-
- Alat Studio Rp. 24.121.000,- (Belanja Modal Kamera digital Rp. 20.169.000,- dan
Belanja modal rak peralatan lab ling Rp. 3.952.000,-)
- Unit Alat Laboratorium Rp. 23.171.000,- (Belanja modal : buret, corong pisah, kuvet
Lab Ling)
- Persenjataan Non Senjata Api Rp. 1.000.000,-(Belanja Modal : erlenmeyer lab ling)
- Komputer Unit Rp. 40.260.000,- (Belanja Modal : pengadaan komputer PC 4 unit
secretariat)
- Peralatan Komputer Rp. 52.338.000,- (Belanja Modal : printer 7 unit, viewer 2 unit di
secretariat)

Dari Balai KPH Mutasi tambah Peralatan dan Mesin dari belanja modal sebesar Rp 299.778.000,00 dan dari pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp 182.298,00

b. Mutasi Kurang

Dari Balai KPH untuk Mutasi kurang Peralatan dan Mesin dari penghapusan intracountable sebesar Rp 464.483.150,00, sedangkan dari ekstracountable sebesar Rp0,00.

c. Ekstrakomtabel

Nihil

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp. 20.540.134.025,98 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	2020	2019
1.	Alat-Alat Besar Darat	24.970.022.262,00	21.937.660.012,00
2.	Alat-alat Bantu	520.910.160,00	468.116.160,00
3.	Alat Angkutan Darat Bermotor	5.635.601.265,40	5.561.601.265,40
4.	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	29.220.000,00	33.220.000,00
5.	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	89.000.000,00	89.000.000,00
6.	Alat Bengkel Bermesin	144.629.600,00	144.629.600,00
7.	Alat Bengkel Tak Bermesin	53.610.000,00	53.610.000,00
8.	Alat Ukur	550.702.428,58	550.712.428,58
9.	Alat Pengolahan	134.006.000,00	135.006.000,00
10.	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	7.356.500,00	7.356.500,00
11.	Alat Kantor	1.008.464.250,00	925.583.750,00
12.	Alat Rumah Tangga	3.936.342.011,00	3.760.758.011,00
13.	Komputer	2.470.843.812,00	2.346.831.112,00
14.	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	532.478.100,00	536.075.100,00
15.	Alat Studio	733.294.030,00	709.173.030,00
16.	Alat Komunikasi	699.374.503,00	763.742.603,00
17.	Peralatan Pemancar	83.157.300,00	63.007.300,00
18.	Unit-Unit Laboratorium	7.120.140.710,00	7.018.059.710,00
19.	Alat Peraga/Praktek Sekolah	80.747.000,00	80.747.000,00
20.	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	2.262.815.000,00	2.262.815.000,00
21.	Alat Lab Fisika Nuklir / Elektronika	13.700.000,00	13.700.000,00
22.	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	8.232.500,00	8.232.500,00
21.	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1.632.950.000,00	1.632.950.000,00
22.	Peralatan Lab Hidrodinamika	71.550.000,00	71.550.000,00
23.	Senjata Api	6.500.000,00	6.500.000,00
24.	Persenjataan Non Senjata Api	1.000.000,00	0,00
	Jumlah	<u>52.901.527.431,98</u>	<u>49.180.637.087,98</u>

Adapun rincian saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 di masing-masing KPA adalah sebagai berikut :

No	K P A	Jumlah 2020	Jumlah 2019
1.	Induk	37.462.048.001,98	33.758.751.007,98
2.	Balai KPH	15.439.479.430,00	15.421.886.080,00
	Jumlah	<u>52.901.527.431,98</u>	<u>49.180.637.087,98</u>

3.3.1.2.3 Gedung dan Bangunan Rp 38.474.866.728,94 Rp 38.315.603.145,00

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 38.474.866.728,94 dengan penjelasan perubahan mutasi sebagai berikut:

a. Mutasi Tambah

Mutasi tambah Gedung dan Bangunan berasal dari

- Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp 81.896.000,00.

- Belanja Non Modal bangunan kanopi tempat parkir dan ruang arsip Balai Tahura dari belanja pemeliharaan Rp. 26.443.000,-
- Belanja Modal Pos Jaga Tahura Rp. 55.453.000,-
 - Belanja Modal Portal Tahura Rp. 7.920.000,-
- b. Mutasi Kurang
Mutasi kurang nihil.
- c. Penerimaan hibah
Penerimaan hibah sebesar Rp. 0,00
- d. Ekstrakomtabel
Hasil Belanja Modal pengadaan Gedung dan Bangunan (Tugu/Tanda Batas) Tahun 2020 yang disajikan sebagai aset ekstrakomtabel adalah sebesar Rp. 7.920.000,-

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp. 38.474.866.728,94 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	2020	2019
1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	37.306.469.476,94	37.224.573.476,94
2.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	854.437.372,00	854.437.372,00
3.	Tugu Peringatan	269.348.000,00	269.348.000,00
4.	Tugu Titik Kontrol/Pasti	44.611.880,00	44.611.880,00
	Jumlah	38.474.866.728,94	38.392.970.728,94

Adapun rincian saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 di masing-masing KPA adalah sebagai berikut :

No	K P A	Jumlah 2020	Jumlah 2019
1.	Induk	27.812.342.076,00	27.730.446.076,00
2.	Balai KPH	10.662.524.652,94	10.662.524.652,94
	Jumlah	38.392.970.728,94	38.392.970.728,94

3.3.1.2.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp 26.262.821.863,00 Rp 26.981.929.879,00

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 26.262.821.863,00 dengan penjelasan perubahan mutasi sebagai berikut:

- a. Mutasi Tambah
Mutasi tambah Jalan, Irigasi dan Jaringan terdiri dari :
- Bangunan Air Irigasi : Rp. 36.778.500,- Reklas DED Telaga Desa Babarsari
 - Jaringan Listrik : Rp. 63.168.600,- Belanja Non Modal : pengadaan listrik baru di Persemaian Bunder BBH
 - Bahan Perpustakaan Tercetak : Rp. 3.518.800,-
 - Konstruksi Dalam Pengerjaan : Rp. 35.188.600,-
 - Pemasangan pagar bak pengendap Bunder, GK (kapitalisasi pemeliharaan bak pengendap BBH) Rp. 107.712.984,-
- b. Mutasi Kurang
Mutasi kurang reklas antar Aset Tetap Rp. 36.778.500,-
Mutasi kurang Bangunan Air Irigasi dilimpahkan ke Dikpora Bangunan Embung Babarsari sebesar Rp. 926.768.100,-
- c. Penerimaan hibah
Penerimaan hibah nihil.
- d. Ekstrakomtabel
Sebagai aset ekstrakomtabel adalah sebesar Rp. 0,00.

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp. 26.262.821.862,00_ dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	2020	2019
1.	Jalan	13.247.862.069,00	13.247.862.069,00
2.	Jembatan	217.345.712,00	217.345.712,00
3.	Bangunan Air Irigasi	11.760.000,00	901.749.600,00
4.	Bangunan Air Pasang Surut	4.260.000,00	0,00
4.	Bangunan Air Rawa	19.583.000,00	19.583.000,00
5.	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.159.873.035,00	1.159.873.035,00
6.	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	731.925.984,00	624.213.000,00
7.	Bangunan Air Bersih/Baku	9.354.394.711,00	9.354.394.711,00
8.	Bangunan Air Kotor	392.150.000,00	392.150.000,00
9.	Bangunan Air	0,00	4.260.000,00
10.	Instalasi Air Minum Bersih	99.584.202,00	99.584.202,00
11.	Instalasi Pembangkit Listrik	9.000.000,00	9.000.000,00
12.	Instalasi Gardu Listrik	279.198.025,00	279.198.025,00
13.	Instalasi Pertahanan	109.032.800,00	109.032.800,00
14.	Instalasi Pengaman	106.975.000,00	106.975.000,00
14.	Jaringan Air Minum	241.053.660,00	241.053.660,00
15.	Jaringan Listrik	277.573.665,00	214.405.065,00
16.	Jaringan Telepon	1.250.000,00	1.250.000,00
	Jumlah	26.262.821.862,00	26.981.929.879,00

Adapun rincian saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 di masing-masing KPA adalah sebagai berikut :

No	K P A	Jumlah 2020	Jumlah 2019
1.	Induk	18.474.410.942,00	19.193.518.958,00
2.	Balai KPH	7.788.410.921,00	7.788.410.921,00
	Jumlah	26.262.821.862,00	26.981.929.879,00

3.3.1.2.5 Aset Tetap Lainnya Rp 1.101.417.987,00 Rp 1.128.499.187,00

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.101.417.987,00 dengan penjelasan perubahan mutasi sebagai berikut:

a. Mutasi Tambah

Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya yang berasal dari hasil pengadaan melalui Belanja Modal selama Tahun 2020 adalah :

Belanja modal DED dari TAHURA Pembangunan GASEBO dan Toilet Rp. 16.197.500,-

Belanja modal DED Dipo Arsip Rp. 14.455.100,- + ATK Rp. 4.536.000,-

Belanja Non Modal, Reklas dari persediaan ke aset tetap, Belanja Buku Rp. 3.518.800

b. Mutasi Kurang

Mutasi kurang Aset Tetap Lainnya :

Reklas dari KDP ke Konstruksi Bangunan Embung Babarsari Rp. 36.778.500,-

c. Penerimaan hibah

Penerimaan hibah sebesar Rp. 0,00

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp. 1.101.417.987,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	2020	2019
1.	Buku	176.177.501,00	172.658.701,00
2.	Barang-barang Perpustakaan	15.000.000,00	15.000.000,00
3.	Alat Olah Raga Lainnya	30.600.000,00	30.600.000,00
4.	Tanaman	910.240.486,00	910.240.486,00
	Jumlah	1.101.417.987,00	1.128.499.187,00

Adapun rincian saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 di masing-masing KPA adalah sebagai berikut :

No	K P A	Jumlah 2020	Jumlah 2019
1.	Induk	1.082.947.927,00	1.082.947.927,00
2.	Balai KPH	45.551.260,00	45.551.260,00
	Jumlah	1.128.499.187,00	1.128.499.187,00

3.3.1.2.6 Akumulasi Penyusutan Rp -53.759.059.379,31 Rp -47.037.849.653,71

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020 sebesar Rp -53.759.059.379,31 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2020	2019
1.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-35.185.042.083,96	-30.511.132.664,37
2.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-7.121.386.709,55	-6.266.902.421,55
3.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	-11.452.630.585,80	-10.259.814.567,79
	Jumlah	-53.759.059.379,31	-47.037.849.653,71

Adapun rincian saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020 di masing-masing KPA adalah sebagai berikut :

No	K P A	Jumlah 2020	Jumlah 2019
1.	Induk	-32.599.052.130,14	-27.025.910.416,64
2.	Balai KPH	-21.160.007.249,17	-20.011.939.237,07
	Jumlah	-53.759.059.379,31	-47.037.849.653,71

3.3.1.3 Aset Lainnya Rp 4.609.793.897,00 Rp 5.035.231.141,00

Aset Lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 4.609.793.897,00 dengan rincian sebagai berikut:

3.3.1.3.1 Aset Tidak Berwujud Rp 3.996.135.250,00 Rp 4.411.336.650,00

Saldo ATB per 31 Desember 2020 sebesar Rp 3.996.135.250,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2020	2019
1.	Aset Tidak Berwujud Lainnya	3.996.135.250,00	4.411.336.650,00
	Jumlah	3.996.135.250,00	4.411.336.650,00

Adapun rincian saldo ATB per 31 Desember 2020 di masing-masing KPA adalah sebagai berikut :

No	K P A	Jumlah 2020	Jumlah 2019
1.	Induk	3.948.257.750,00	4.363.459.150,00
2.	Balai KPH	47.877.500,00	47.877.500,00
	Jumlah	3.996.135.250,00	4.411.336.650,00

3.3.1.3.2 Aset Lain-lain

Rp 613.658.647,00

Rp 623.894.491,00

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor : 52 Tahun 2011 tentang Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Daerah ditetapkan bahwa yang termasuk dalam klasifikasi Aset Lain-lain adalah Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah/ yang akan dihapus dan aset tetap dalam kondisi rusak berat.

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 619.191.866,00 berasal dari saldo awal tahun 2019 setelah penyesuaian sebesar Rp. 623.894.491,00 ditambah (mutasi bertambah) sebesar Rp. 415.460.409,00 dan adanya akumulasi penyusutan aset lain-lain sebesar Rp. -420.163.034,00

No	Uraian	2020	2019
1.	Aset Lain-lain	1.039.354.900,00	643.062.750,00
2.	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	-425.696.253,00	-19.168.259,00
	Jumlah	613.658.647,00	623.894.491,00

Adapun rincian saldo Aset lain-lain per 31 Desember 2020 di masing-masing KPA adalah sebagai berikut :

No	K P A	Jumlah 2020	Jumlah 2019
1.	Induk	567.915.272,00	623.894.491,00
2.	Balai KPH	45.743.375,00	0,00
	Jumlah	613.658.647,00	623.894.491,00

3.3.2 Kewajiban

Rp 29.706.538,00

Rp 35.586.000,00

Kewajiban per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 29.706.538,00 dengan rincian sebagai berikut:

3.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Rp 29.706.538,00

Rp 35.586.000,00

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 29.706.538,00 dengan rincian sebagai berikut:

3.3.2.1.1 Utang Belanja

Rp 29.706.538,00

Rp 35.586.000,00

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2020 merupakan kewajiban atas layanan barang/jasa yang telah dikonsumsi oleh SKPD namun sampai dengan dengan per 31 Desember 2020 belum dibayar oleh SKPD dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2020	2019
	Utang Belanja Jasa	29.706.538,00	35.586.000,00
	Jumlah	29.706.538,00	35.586.000,00

Adapun rincian saldo Utang Belanja per 31 Desember 2020 di masing-masing KPA adalah sebagai berikut :

No	K P A	Jumlah 2020	Jumlah 2019
1.	Induk	24.000.616,00	24.682.308,00
2.	Balai KPH	5.705.922,00	10.903.692,00
	Jumlah	29.706.538,00	35.586.000,00

3.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

3.4.1 Ekuitas **Rp 112.790.126.033,24** **Rp 116.853.960.307,36**

Saldo Ekuitas sebesar Rp. **112.790.126.033,24** merupakan kekayaan bersih SKPD yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban SKPD pada tanggal 31 Desember 2020. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah Surplus/Defisit-LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2020	2019
	Ekuitas awal	116.853.960.307,36	116.853.960.307,36
	Surplus Defisit – LO	-34.037.610.111,42	0,00
	Ekuitas Dikonsolidasikan:		
	RK PPKD	27.775.596.408,29	0,00
	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	0,00	0,00
	Jumlah Ekuitas Akhir	112.790.126.033,24	116.853.960.307,36

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN D.I. YOGYAKARTA

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kehutanan dan Lingkungan Hidup. Secara umum dinas mengemban tugas di dalam pengendalian dan pelestarian hutan negara, pengembangan hutan rakyat dan penanganan lahan kritis serta pengelolaan Lingkungan Hidup rakyat

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas “melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah”. Sejalan dengan tugas yang diemban tersebut maka Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup DIY memiliki fungsi dalam :

1. Penyusunan Program dan Pengendalian di Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
2. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
3. Pelaksanaan Penataan dan Perlindungan Hutan.
4. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Produksi hutan serta pemasarannya.
5. Pelaksanaan Pengembangan, Perlindungan, Pengolahan dan Pemasaran hasil Lingkungan Hidup.
6. Pelaksanaan Koordinasi perijinan dibidang kehutanan dan Lingkungan Hidup.
7. Pelaksanaan Pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya.
8. Penyelenggaraan kegiatan kehutanan dan Lingkungan Hidup Lintas Kabupaten/Kota.
9. Pemberian fasilitas penyelenggaraan bidang kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.
10. Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.
11. Pelaksanaan kegiatan Ketatausahaan.
12. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Sejalan kewenangan dan kompetensi Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta, maka ditetapkan visi sebagai berikut :

“Terwujudnya hutan lestari dan agribisnis Lingkungan Hidup yang berdaya saing untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat”.

Perumusan visi mendasarkan pada peran yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan hutan lestari dan agribisnis Lingkungan Hidup yang berdaya saing untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan misi sebagai berikut :

1. Memantapkan status dan fungsi hutan.
2. Optimalisasi fungsi dan manfaat hutan secara lestari.
3. Mewujudkan perlindungan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
4. Mewujudkan peningkatan produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk kehutanan dan Lingkungan Hidup
5. Mewujudkan peningkatan pemberdayaan petani hutan dan kebun serta kelembagaannya.
6. Mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia kehutanan dan Lingkungan Hidup.

STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas :

1. Sekretariat

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Keuangan
- Sub Bagian Program

2. Bidang Penataan Hutan, Pengkajian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup

- Seksi Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
- Seksi Pengkajian Lingkungan Hidup
- Seksi Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup

3. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

- Seksi Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- Seksi Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

4. Bidang Planologi dan Produksi Hutan

- Seksi Planologi Hutan
- Seksi Produksi dan Pemasaran Hasil Hutan
- Seksi Perhutanan Sosial dan Penyuluhan

5. Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Alam

- Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- Seksi Konservasi Sumberdaya Alam
- Seksi Perlindungan dan Pengaman Hutan

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Program

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG PENATAAN, PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG PLANOLOGI DAN PRODUKSI HUTAN

BIDANG REHABILITASI DAN KONSERVASI ALAM

Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan

Kepala Balai

Sub Bag Tata Usaha

Seksi Perencanaan dan Reboisasi

Seksi Pemanfaatan Hutan

Balai Perbenihan Kehutanan

Kepala Balai
Sub Bag Tata Usaha
Seksi Pengembangan Perbenihan
Seksi Sertifikasi Benih Kehutanan

Balai Laboratorium Lingkungan

Kepala Balai
Sub Bag Tata Usaha
Seksi Pengendalian Mutu
Seksi Pengujian

Balai Pengelolaan Sampah

Kepala Balai
Sub Bag Tata Usaha
Seksi Pengumpulan dan Pengangkutan
Seksi Pengolahan dan Pemrosesan Akhir

BAB V

PENUTUP

Laporan Keuangan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup D.I. Yogyakarta Tahun 2020 merupakan laporan keuangan berbasis akrual yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah yang selambat-lambatnya harus diterapkan pada Tahun 2015.

Laporan Keuangan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup D.I. Yogyakarta Tahun 2020 disusun dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang terintegrasi sejak penganggaran, penatausahaan dan pelaporan. Untuk penyajian aset tetap di neraca didukung dengan SIPKD Modul Aset.

Perencanaan anggaran Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup D.I. Yogyakarta Tahun 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sedangkan dalam pelaporan kode rekening pendapatan dan belanja yang digunakan dalam penganggaran dikonversi sesuai dengan Bagan Akun Standar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Keuangan Tahun 2020 yang telah kami sajikan ini masih belum sempurna. Sehubungan dengan kondisi tersebut kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup D.I. Yogyakarta untuk periode yang akan datang, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan.

Yogyakarta, 31 Desember 2020

PLT. Kepala SKPD

Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup D.I.
Yogyakarta

IR.HANANTO HADI PURNOMO, M.SC.

NIP. 19610223 198902 1 001

LAMPIRAN